

BAB V

KESIMPULAN

Konflik Sudan Selatan yang berkepanjangan mengakibatkan permasalahan semakin rumit di mana konflik internal menyebar menjadi konflik etnis yang mengakibatkan perang sipil. Proses perdamaian yang di pimpin IGAD telah menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam dialog antara Pemerintah Republik Sudan Selatan dan para pemberontak yang dipimpin oleh Riek Machar. Kesenjangan ini telah muncul karena proses perdamaian yang dipimpin IGAD dianggap bias. Pemaparan di atas telah menunjukkan bahwa IGAD sebagai mediator gagal dalam mencapai kesepakatan damai di karenakan ketidakmapuan IGAD dalam menjalankan fungsi ekstraksi dan terminasi sebagai mediator dalam proses mediasi. Dimana kemampuan seorang mediator dapat menentukan akan keberhasilan dari proses mediasi yang di lakukan.

Ketidakmapuan IGAD dalam menjalankan fungsi ekstraksi terlihat pada sikap imparisial IGAD dalam pembagian kekuasaan pada pembentukan pemerintah transisi antara Pemerintah Sudan Selatan dan Pemberontak. Dimana dokumen yang di keluarkan oleh IGAD, yang dikenal sebagai Perjanjian dalam Pembentukan Pemerintahan Transisi Nasional, selain telah memperdalam kesenjangan antar kedua belah pihak dalam membangun perdamaian di Sudan Selatan, hal tersebut juga hanya berkonsentrasi pada proses pengambilan keputusan di tangan elit politik.

Selain itu, ketidakmampuan IGAD dalam melaksanakan fungsi Terminasi semakin mempersulit proses perdamaian. Dimana IGAD sebagai mediator sulit untuk menarik diri dari konflik Sudan Selatan yang di karenakan keterlibatan negara - negara regional maupun aktor internasional pada konflik tersebut. Selain itu, kekhawatiran

IGAD pada tidak menyeimbangnya kekuatan antar kedua belah pihak berkat bantuan pihak lain baik berupa kekuatan militer, senjata, amunisi dan sebagainya dapat mengakibatkan salah satu pihak merasa lebih kuat dan menang dalam melakukan pertempuran untuk melemahkan lawan.

Oleh karena itu, kegagalan IGAD berawal dari ketidakmampuan IGAD sebagai mediator dalam mengelola keterlibatan aktor negara baik negara dalam regional maupun negara adikuasa membuat kedua belah pihak sulit mempercayai keterlibatan IGAD dalam proses mediasi melihat bahwa aktor negara akan membawa kepentingan politisi meskipun aktor non negara juga tidak dapat di lepaskan dari kepentingan politisi.

Selain itu, terlihat bahwa IGAD tidak memiliki kapabilitas dalam penyelesaian konflik yang dikarenakan IGAD sebagai mediator tidak dapat mencegah kepentingan politisi negara lain yang tergabung dari negara adikuasa. Hal tersebut menjelaskan kurangnya IGAD dari setiap kredibilitas sebagai mediator dalam situasi Sudan Selatan saat ini. Faktor-faktor yang telah di jelaskan di atas, telah memainkan peran penting dalam kegagalan mediasi IGAD. Hal ini menunjukkan bahwa IGAD sebagai mediator tidak memahami situasi konflik di Sudan Selatan.